

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis

Sri Rahmany, Fatimah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
sriahmanyahra@gmail.com, fatimah.bkls@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.223>

Received: Mei 11, 2020 Revised: Jun 03, 2020 Accepted: Jun 17, 2020 Published: Jun 25, 2020

ABSTRACT

Regional Autonomy requires the Regional Government to be able to provide the best service to the community. One form of the service is to provide transparent financial information. The purpose of this research was to determine the internal control system on the quality of Bengkalis Regency's financial statements reviewed according to the Islamic perspective. This research uses qualitative analysis with descriptive methods. The results showed that the internal control system can minimize the occurrence of fraud/errors both in recording and presenting financial statements as evidenced by the monitoring of accounting records so that the resulting financial statements can be as desired and accountable.

Keywords: Internal Control System, Financial Report Quality, Local Government.

ABSTRAK

Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-bainya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi keuangan yang transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis ditinjau menurut perspektif islam. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat meminimalisir terjadinya kecurangan/kesalahan baik dalam pencatatan maupun penyajian laporan keuangan yang dibuktikan dengan adanya pemantauan terhadap pencatatan akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa sesuai dengan yang diinginkan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Suatu organisasi yang didirikan seiring diberlakukannya Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan



pemerintah daerah dan terus dilakukan evaluasi dan evolusi, selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 khususnya pasal 31 disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali kota menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja keuangan kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Hal tersebut diperlukan untuk penerapan sistem akuntansi yang ada.

Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan. Selain tingkat pendidikan dan pengalaman kerja SKPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dibidang akuntansi atau keuangan. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi didalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur dari mulai proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan.

Selain sumber daya manusia yang berkompeten, sistem pengendalian internal juga penting dalam penyusunan laporan keuangan, sistem pengendalian internal adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode yang digunakan didalam perusahaan atau badan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong kepatuhan kebijakan manajemen.

Implementasi sistem pengendalian internal menuntut adanya komitmen dan peran aktif para pemimpin daerah pada setiap level dan tingkatan organisasi. Peran kepemimpinan daerah pada dasarnya ada di semua tingkatan organisasi yang bersifat sistemik dan institusional. Sistemik artinya terkait dengan banyak orang yang bekerja berdasarkan suatu sistem dan pada suatu tingkatan tertentu dalam organisasi, sedangkan institusional artinya melibatkan banyak orang dalam kepemimpinan tersebut dan masing-masing memiliki posisi dalam institusi tersebut. Oleh karena itu kepemimpinan daerah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam usaha mencapai kinerja daerah sehingga pemimpin daerah haruslah memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu kerja sama di antara sistem yang ada di dalam pemerintah daerah.

Pelaporan keuangan dalam Islam dengan mendasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat akuntansi syariah sesuai dengan fitrah (kecenderungan) manusia yang menghendaki terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial. Akan tetapi sistem pengendalian yang belum optimal yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal



ini menggambarkan sistem pengelolaan dan tanggung jawab khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

TELAAH LITERATUR

Sistem Pengendalian Internal

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan (Baridwan 2012). Sistem menurut Mulyadi (2008, 5) menyatakan bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Hall (2007, 6) sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama (Wahyuni 2013).

Bodnar dan Hoopwood (2006, 3) menyatakan bahwa sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai satu tujuan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang tercapainya tiga golongan salah satunya adalah yaitu keandalan pelaporan keuangan (Tunggal 2010, 195).

Reeve et al. (2013, 387) mendefinisikan Pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. *Libby, Libby, & Short* (2008, 298) mendefinisikan pengendalian internal adalah proses yang digunakan perusahaan untuk mengamankan aset perusahaan dan member jaminan yang memadai terkait dengan reliabilitas pelaporan keuangan perusahaan, efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, dan kesesuaian operasi perusahaan dengan aturan dan regulasi yang berlaku (Tandri et al. 2015).

Sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan suatu perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya (Hery 2014, 12).

Menurut teori sebelumnya, (Krismiaji 2005; Hall 2007; Romney dan Stein Bart 2003; Baridwan 2008; Mulyadi 2008; Winarno 2006; Sutabrin 2004; Tunggal 2001; Widjajanto 2008; Sugianto 2007; Nugroho 2002; Supomo 2009; Marom 2002; Yusup 2000; Badnas 2003; Susanto 2002; Puspita 2011) pemahaman sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan tindakan atau ukuran yang ditetapkan dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong ketaatan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan (Wahyuni 2013).

Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah menyatakan bahwa: "Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan



secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah”.

Sistem pengendalian internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi: Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut. Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Adapun tujuan lain dari pengendalian internal adalah menjamin bahwa data yang diinformasikan ke pihak manajemen adalah nilai yang tingkat keandalannya tinggi, sehingga kemungkinan manajemen mengambil keputusan yang keliru karena data yang salah dapat dijaga tingkat minimal (Naingoalan 2010, 196).

Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Manajemen harus menguji efektifitas pelaksanaan pengendalian. Tujuan penggunaan ini adalah untuk apakah pengendalian telah berjalan seperti yang telah dirancang apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif. Organisasi-organisasi publik, non publik, dan nirlaba diwajibkan menaati beberapa hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti undang-undang perlindungan hukum dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Adapun sumber hukum tentang pengendalian internal adalah Firman Allah SWT dalam Surah An-nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya (Indra 2006, 137). Karakteristik kualitatif laporan



keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan laporan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan, kepatuhan dan bermanfaat untuk masyarakat. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan atau sering disebut dengan kerangka konseptual, merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusun standar dalam mengembangkan standar dimasa mendatang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Kerangka konseptual ditujukan untuk: (1) Penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. (2) Penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. (3) Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. (4) Para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Martani et al. 2012, 9).

Menurut *Public Sector Committee – IFAC*, tujuan laporan keuangan sektor publik dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Memberikan informasi yang bermanfaat. (2) Memenuhi kebutuhan pemakai. (3) Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum. (4) Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan kontrak keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah). (5) Menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan uang kas. (6) Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi komitmen dan kewajibannya. (7) Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahannya organisasi sektor publik. (8) Menyediakan informasi untuk mengevaluasi performansi organisasi sektor publik terutama yang terkait dengan biaya operasi efisiensi dan pencapaian target.

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (revisi 2009) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil



pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Martani et al. 2012, 9).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran. (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). (3) Neraca. (4) Laporan Operasional (LO). (5) Laporan Arus Kas (LAK). (6) Laporan Perubahan Ekuitas. (7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) (RI 2010).

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap 2008). Laporan keuangan secara standar yang memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks pembahasan manajemen keuangan maka standar pelaporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas yang memuat informasi menjadi berguna bagi para pemakainya (Harmono 2014, 14).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan”. Ada empat prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (RI 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, yang beralamat di jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis pada tahun 2017. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

Sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan suatu perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya. Sedangkan laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dengan adanya sistem pengendalian internal membuat laporan keuangan akan berkualitas, karena sistem pengendalian tidak terlepas dengan adanya pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal



merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan, sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada diluar unit organisasi/lembaga yang diawasi. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Bengkalis dilakukan oleh kasubag keuangan dan pimpinan.

Sedangkan pengawasan ekstenal dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Bengkalis dilakukan secara langsung oleh lembaga Inspektorat. Agar tidak terjadinya kesalahan atau menyalahi aturan yang beralaku dan tidak terjadinya penyelewengan maupun kesalahan dalam penggelolaannya yang dapat merugikan maka diberlakukan nya sebuah pengendalian internal terhadap laporan keuangan sebagai berikut: (1) Adanya lingkungan pengendalian. (2) Penilaian resiko. (3) Adanya kegiatan pengendalian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Adanyan informasi dan komunikasi. (5) Adanya pemantauan terhadap pencatatan laporan keuangan. (6) Adanya pemisahan tugas yang jelas baik dari segi bagian keuangan maupun bagian tanga akuntansi.

Adapun unsur-unsur pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2008 adalah sebagai berikut: (1) Lingkungan pengendalian dibentuk karena setiap pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan prilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian interanal dalam lingkungan kerjanya. Pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Bengkalis sudah adanya lingkungan pengendalian ini dimana masing-masing staf mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang tepat dan memiliki hubungan yang baik serta perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif. (2) Penilaian resiko dapat menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, penilaian resiko ini dilakukan untuk meminimalisir agar tidak terjadi nya kesalahan. (3) Kegiatan pengendalian dibentuk karena pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pemabagian tugas sudah cukup jelas, dengan dibentuknya masing-masing pertanggungjawaban atas pekerjaan yang diberikan dimana masing-masing staf bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (4) Informasi dan komunikasi dibentuk kerena pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah informasi dan komunikasi ini sudah efektif. Informasi diberikan kepada masing-masing SKPD untuk mengetahui hasil audit biasanya infomasi ini dilakun setiap 1 tahun sekali. Sedangkan komunikasi dilakukan didalam lingkungan BPKAD itu sendiri biasanya laporan keuangan akan dikomunikasikan setiap bulan nya, biasanya laporan keuangan LRA yang bertujuan untuk mengetahui berapa anggaran,berapa pemakaian, sisanya dan lain-lain. (5) Pemantauan pengendalian internal dibentuk karena masing-masing instansi wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal melalui pemantauan atas pencatatannya, evaluasi terpisah dan penyelesaian audit.



Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan dari manajemen dilaksanakan dengan baik. Selain ke empat unsur-unsur pengendalian internal diatas BPKAD juga memiliki berapa prinsip yang diterapkan yaitu: (1) Dibentuk pertanggungjawaban, pengendalian akan efektif hanya satu orang yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Penetapan tanggung jawab masing-masing staf dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu yang di percaya kepadanya. (2) Pemisahan tugas ini dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan masing-masing staf berbeda seharusnya dikerjakan oleh staf yang berbeda pula begitu juga di BPKAD masing-masing staf memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda. (3) Pengendalian fisik, mekanik dan elektronik, pengendalian ini sangat penting karena akan meningkatkan akurasi akuntansi. Di BPKAD sudah adanya pengendalian, fisik, mekanik dan elektronik di mana setiap pencatatan akan langsung diawasi maupun aplikasi yang digunakan secara online. Selain itu di BPKAD menggunakan kamera CCTV untuk memantau langsung setiap pekerjaan yang dilakukan masing-masing staf sehingga berguna dalam mengawasi segala aktivitas yang terjadi. (4) Pengecekan independen atau variabel internal, ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mengecek atau meninjau ulang atas pencatatan laporan keuangan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahan dalam laporan keuangan.

Selain itu serangkaian prosedur pengendalian internal juga dilakukan antara lain: (1) Penggunaan wewenang ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain. Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dimana masing-masing staf mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan bidangnya masing-masing. (2) Pemisahan tugas yang dilakukan oleh Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar pekerjaan yang masing-masing staf berbeda sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing staf agar pekerjaan yang dilakukan bisa lebih efektif. (3) Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan, keamanan terhadap aset dan catatan perlu dilakukan agar tidak terjadinya pencurian. Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan CCTV disetiap ruangan agar lebih mudah memantau setiap hal yang terjadi. (4) Pengecekan independen terhadap kinerja, pengecekan dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan. Semua aktiva yang ada harus dicek secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dan prosedur pengendalian internal yang terdapat didalam nya sudah diterapkan atau dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan begitu juga dengan prinsip-prinsip yang terdapat didalam sistem pengendalian internal sudah diterapkan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan cara pengawasan terhadap laporan keuangan dan pencatatan nya. Pencatatan dilakukan dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan sehingga berbentuk laporan keuangan.



Berdasarkan penyajian data diatas dapat penulis analisis tentang sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, karena semua dibuat sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) yang telah melakukan aktivitas-aktivitas pengendalian internal seperti: adanya pemantauan terhadap laporan keuangan ini dilakukan untuk pengendalian lingkungan, komunikasi dan informasi, kegiatan pengendalian, dan pemisahan tugas.

Pengawasan pengendalian internal di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dilakukan atas pengendalian yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengawasan dilakukan agar pengendalian dipandang relevan oleh pihak auditor dalam mencegah/mendeteksi salah saji laporan keuangan. Pengendalian akan menjadi sangat efektif apabila hanya satu orang yang bertanggung jawab suatu tugas.

Adapun aktivitas pengendalian pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis adalah setiap staf dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas.

Dengan adanya sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan laporan keuangan.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang maksimal diperlukan adanya pemantauan. Untuk di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah juga melakukan pemantauan baik dari internal maupun eksternal. Pemantauan yang dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dari segi internal berasal dari tenaga akuntan. Sedangkan dari segi eksternal di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah pemantauan dilakukan oleh Badan Inspektorat. Adapun pemantauan terhadap semua kegiatan pencatatan laporan keuangan dilakukan oleh pimpinan dan kasubag keuangan.

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Perspektif Islam

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya. Sistem pengendalian internal tidak terlepas dari adanya manajemen, sedangkan manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan proses pengorganisasian seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan. Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan bukan hanya oleh perusahaan, namun juga oleh perorangan, keluarga maupun pemerintah (Najmudin 2011, 39).

Peran manajer keuangan dalam perusahaan adalah mampu mengantisipasi perubahan. Tanggung jawabnya mencakup berbagai aspek pengembangan yang vital secara keseluruhan dalam perusahaan, antara lain meyakinkan catatan-catatan keuangan secara cermat, menyajikan laporan keuangan dengan memperhatikan karakteristik laporan keuangan (Harmono 2014, 1).

Secara ilmiah, perkembangan manajemen muncul di awal terbentuknya negara industri pada pertengahan kedua abad ke 19. Menurut pandangan-pandangan kaum intelektual, manajemen lahir sebagai tuntutan perlunya



pengaturan hubungan di antara individual dalam suatu masyarakat. Adanya kebutuhan negara untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap rakyat selain itu dalam dunia industri. Hal ini tidak berarti bahwa manajemen tidak atau belum dikenal sebelumnya, atau perkembangan manajemen terkait dengan perkembangan masyarakat Amerika dan Eropa. Kelahiran dan perkembangan manajemen bisa dikembalikan pada awal proses penciptaan alam ini (Sinn 2008, 27).

Defenisi manajemen dalam islam tidak jauh dari pemahaman ini. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan diawal kepemimpinan Islam. Di samping itu manajemen memiliki empat fungsi standar yaitu, Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengawasan. Akan tetapi ke empat fungsi manajemen tersebut telah dijalankan dalam islam, namun tidak semua nya dijalankan pada waktu tersebut belum dikenal fungsi manajemen dengan istilah-istilah modern. Akan tetapi fungsi dan peran manajemen telah tercermin dan di terapkan dalam kehidupan muslim.

Ketika perkembangan islam mulai tampak, dan islam telah didakwahkan secara terang- terangan, Rasulullah Saw mulai memimpin pada masa itu. Cerminan manajemen yang dijalankan Rasulullah pada masanya mulai dari pengaturan kerja, pemilihan pegawai sesuai dengan kompetensinya, konsep syura dalam pengambilan keputusan, pengawasan terhadap kinerja pegawai, ataupun pengarahan dan memberikan petunjuk. Rasulullah juga berusaha menegakkan keadilan dan persamaan perlakuan hukum kepada umatnya, mencukupi kebutuhan setiap individu masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Di masa pemerintahan pertama masih terdapat pertentangan dan perselisihan antara negara islam dan sisa-sisa kabilah arab yang masih berpegang teguh pada jahiliyah. Namun demikian, kegiatan pengaturan manajemen pemerintah Khalifah Abu Bakar telah dimulai, yakni adanya pembagian wilayah dan provinsi, sentral organisasi dan pengawasan.

Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khatab r.a. sudah di praktekkan konsep dasar hubungan antara negara dan rakyat, pentingnya tugas pegawai pelayanan publik menjaga kepentingan rakyat dari otoritas pemimpin. Pengaturan manajemen pada masa ini yakni adanya dasar-dasar sistem peradilan, sistem pengawasan, sentral administrasi, dan pemerintah daerah.

Pada masa khalifah Utsman r.a. berusaha menjaga dan melestarikan sistem pemerintahan yang telah ditetapkan oleh khalifah Umar r.a. Begitu juga pada masa Ali bin Abi Thalib menjalankan sistem pemerintahan sebagaimana para khalifah sebelumnya, baik dari segi kepemimpinan atau pun manajemen. Seseorang pemimpin memiliki kewenangan penuh untuk mengelola wilayah yang dikuasanya, namun khalifah tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja terhadap pemimpin tersebut.

Pada masa Bani Umayyah adanya perluasan manajemen dan pada masa Bani Abbasiyah memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan. Berkembanglah lembaga kementerian, sistem peradilan dan pemikiran pembentukan lembaga yang mengawasi kehidupan masyarakat, dan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah tindakan kemungkaran.



Berdasarkan keterangan dan penjelasan tentang nilai-nilai dan konsep dasar islam dalam manajemen, munculnya lembaga-lembaga manajemen pemerintahan, sistem peradilan, lembaga keuangan dan lainnya di masa awal pemerintahan islam, menunjukkan adanya hubungan erat antara konsep dasar islam dan pemikiran manajemen. Hubungan ini dapat dilihat dari kesamaan-kesamaan manajemen dengan konsep islam seperti dapat dilihat dari empat fungsi dasar manajemen. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat juga telah menerapkan fungsi manajemen salah satunya adalah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh para sahabat berupa senantiasa melakukan investigasi dan pengawasan kinerja pegawai, seperti yang diungkapkan salah satu sahabat yaitu Abu Bakar kepada Yazid bin Abu Sufyan, “saya mengangkat kamu untuk menguji, mencoba dan mengeluarkan engkau. Jika engkau mampu bekerja dengan baik, engkau akan aku kembalikan pada pekerjaan bahkan akan aku tambah,. Namum, jika kinerja engkau jelek, aku akan memecatmu”.

Dari segi pengendalian internal dapat kita lihat kesamaannya dalam persfektif islam seperti adanya tanggungjawab dan pembagian tugas. Dizaman kepemimpinan Rasulullah tanggung jawab diterapkan agar para pegawai lebih bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas sedangkan untuk pembagian tugas Rasulullah mengutus para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib untuk menangani tugas kesekretariatan dan perjanjian yang dilakukan rasul. Hudzaifah bertugas menangani dokumen rahasia Rasulullah. Dan orang yang dipercaya untuk menangani tanda tangan dan stempel Rasul adalah Al-harist.

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal di zaman modrem memiliki kesamaan dengan sistem yang dijalankan dalam islam. Pengalaman historis menunjukkan, konsep dasar islam bisa diterapkan dalam aspek peradilan, ekonomi, dan layanan publik masyarakat, setidaknya hal ini bisa dilihat dari munculnya lembaga-lembaga pemerintahan, undang-undang dan hukum yang diterapkan.

Didalam islam sistem pengendalian sudah ada dan sudah di terapkan sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat juga telah menerapkan fungsi manajemen salah satunya adalah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh para sahabat berupa senantiasa melakukan investigasi dan pengawasan kinerja pegawainya. Dari segi pengendalian internal dapat dilihat memiliki kesamaan dalam islam seperti adanya tanggungjawab dan pembagian tugas. Dalam islam pada masa kepemimpinan Rasulullah tanggung jawab diterapkan agar para pegawainya memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaannya masing-masing sedangkan pembagian tugas dilakukan agar setiap orang memiliki tugas nya tersendiri sesuai dengan kemampuan setiap pegawai. Pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu adanya pertanggungjawaban, pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang diberikan. Penetapan tanggungjawab masing-masing staf dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan. Sedangkan pembagian tugas dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan masing-masing staf berbeda dan memiliki tanggungjawab yang berbeda pula.



KESIMPULAN

Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dilakukan pengawasan terhadap laporan keuangan dan pencatatannya. Pencatatan dilakukan dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan sehingga berbentuk laporan keuangan. Pengawasan dilakukan agar pengendalian dipandang relevan oleh pihak auditor dalam mencegah/mendeteksi salah saji laporan keuangan. Pengendalian akan menjadi sangat efektif apabila hanya satu orang yang bertanggung jawab suatu tugas. Adapun aktivitas dan prosedur pengendalian internal pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis adalah setiap staf dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya. Sistem pengendalian internal tidak terlepas dari adanya manajemen, sedangkan manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan proses pengorganisasian seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan. Maka dari itu manajemen dalam Islam tidak jauh dari teknik seni kepemimpinan. Defenisi manajemen dalam Islam muncul setelah Allah SWT menurunkan risalahnya kepada Muhammad SAW, nabi dan rasul akhir zaman. Rasul dan para sahabat telah menggunakan manajemen untuk mengatur kehidupan dan bersandar pada pemikiran manajemen islam yang bersumber dari nash Al-quran dan petunjuk Rasulullah dalam Hadis. Ketika perkembangan islam mulai tampak, dan islam telah didakwahkan secara terang-terangan, Rasulullah SAW mulai memimpin, setelah itu dan para sahabat-sahabatnya seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, yang didalamnya senantiasa melakukan investigasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aviana S. 2012. "Penerapan Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer". *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1 (4).
- Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Syofian. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Harmono. 2014. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. 2014. *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Herniawati, Dayu. 2015. "Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al-Makmur Pokan Komih Limbanang Kec. Suliki Kab. Lima Puluh Kota". *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Bengkalis*.



- Husniyah, Aminatul, Darminto dan Dwiatmanto. 2015. "Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Penggajian Karyawan (Studi pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep)". *Jurnal Adminiistrasi Bisnis (JAB)* 28 (2).
- Ihsanti, Emilda. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)". *Jurnal Akuntansi* 2 (3).
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Jusuli. 2016. "Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas". *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Bengkalis*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2016. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang *pedoman pengelolaan laporan keuangan daerah*.
- Martani, Dwi, Aria Farahmita dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martoyo, Susilo. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Maruta, Heru. 2016. "Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5 (1), 16-28.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Naingoalan, Pahala. 2010. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, Edisi I, Cetakan II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Rahmany, Sri. 2017. "Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Bank Syariah". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6 (2), 193-222.
- Rama, Tri. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah*.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah*.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. 2008. *Manajemen Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tandri, Marchell, Jullie J. Sondakh dan Harijanto Sabijono. 2015. "Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas Di RSUD Pancaran Kasih GMIM Manado". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3 (3).
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2010. *Dasar-Dasar Audit Internal Pedoman Untuk Auditor Baru*. Jakarta: Harvarindo.



- Wahyuni, Sri. 2013. “Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang Pada UD. Dwi Jaya Sentosa Surabaya”. *Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi* 2 (3).
- Yendrawati, Reni. 2013. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kapasitas Sumber daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating”. *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia* 17 (2).

